

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Formulir RKA - PPKD
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2014		
Urusan Pemerintahan	: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI	
Organisasi	: 1.20.00. - PPKD	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	Pendapatan	417.316.196.713,00
4.2.	Dana Perimbangan	378.613.768.473,00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	5.030.898.473,00
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	3.806.001.329,00
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25,Pasal 29 dan Pasal 21	3.635.417.995,00
4.2.1.01.04.	Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	170.583.334,00
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.224.897.144,00
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	289.738.431,00
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	20.600.533,00
4.2.1.02.11.	Bagi Hasil Pertambangan Umum	749.646.200,00
4.2.1.02.12.	Bagi Hasil Kehutanan	164.911.980,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	341.743.150.000,00
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	341.743.150.000,00
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	341.743.150.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	31.839.720.000,00
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	31.839.720.000,00
4.2.3.02.01.	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	5.023.470.000,00
4.2.3.02.02.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	5.162.520.000,00
4.2.3.02.03.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	9.222.800.000,00
4.2.3.02.04.	Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan dan Kelautan	1.903.420.000,00
4.2.3.02.05.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	2.943.240.000,00
4.2.3.02.06.	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	1.208.740.000,00
4.2.3.02.07.	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	700.050.000,00
4.2.3.02.08.	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	968.510.000,00
4.2.3.02.09.	Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi	1.542.150.000,00
4.2.3.02.11.	Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	959.230.000,00
4.2.3.02.12.	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	548.930.000,00
4.2.3.02.13.	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	1.656.660.000,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	38.702.428.240,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.498.604.000,00
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	9.498.604.000,00
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.075.656.000,00
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.760.407.000,00
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.553.271.000,00
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	109.270.000,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.044.774.240,00
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	28.044.774.240,00
4.3.4.01.02.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	26.668.524.240,00
4.3.4.01.03.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.376.250.000,00
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.159.050.000,00
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi	1.159.050.000,00
4.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi.	1.159.050.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	417.316.196.713,00
5.	BELANJA	11.970.709.400,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.970.709.400,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	9.222.000.000,00
5.1.4.03.	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa	1.600.000.000,00

1	2	3
5.1.4.03.01.	Pemerintahan Desa / Kelurahan se-Kota Padang Panjang	1.600.000.000,00
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	7.392.000.000,00
5.1.4.05.01.	Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Keagamaan	1.409.000.000,00
5.1.4.05.02.	Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Pendidikan dan Penelitian	1.340.500.000,00
5.1.4.05.03.	Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Kepemudaan dan olah raga	3.600.000.000,00
5.1.4.05.04.	Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Kesenian dan Kebudayaan	305.000.000,00
5.1.4.05.09.	Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Kewanitaan	207.500.000,00
5.1.4.05.11.	Badan/ lembaga/ organisasi swasta Non Profesi	530.000.000,00
5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	230.000.000,00
5.1.4.06.11.	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Bidang Pertambangan	230.000.000,00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.244.000.000,00
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	327.500.000,00
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan.	277.500.000,00
5.1.5.01.07.	Belanja Bantuan kepada Organisasi Pemangkuan dan Panti	50.000.000,00
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	616.500.000,00
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat.	616.500.000,00
5.1.5.05.	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana	300.000.000,00
5.1.5.05.01.	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana	300.000.000,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DA	500.000.000,00
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	500.000.000,00
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	500.000.000,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.004.709.400,00
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	1.004.709.400,00
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.004.709.400,00
	JUMLAH BELANJA	11.970.709.400,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	405.345.487.313,00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	60.000.000.000,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	60.000.000.000,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	60.000.000.000,00
6.1.1.07.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.000.000.000,00
6.1.1.07.01.	SILPA	60.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	60.000.000.000,00

Padang Panjang, 02 Oktober 2014

Bendahara Umum Daerah

Drs. MASTOTI

NIP. 19550114 198003 1 006